



IDENTIFIKASI DAN MASALAH PERUMUSAN KEBIJAKAN

Roudhotun Ni'mah¹, Zuharisdin Yusuf², Elviyati³, Dewi Hajarul Husna⁴, Husni Ginting Pamungkas⁵, Galuh Ayudya Hadi⁶, M. Nasor⁷

¹⁻⁶Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia

⁷Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

Email: ¹nikmahrouhotun96@gmail.com, ²yusufzuharisdin@gmail.com, ³elviyatihasim@gmail.com,

⁴dewihajarulhusna@gmail.com, ⁵gintingpamungkas343@gmail.com, ⁶galuhayudya91@gmail.com,

⁷nasor@radenintan.ac.id

Abstract

The effectiveness of public policy is largely determined by the accuracy of problem identification and formulation at the early stages of the policy process. In practice, however, many policies in Indonesia encounter serious challenges as public problems are often defined partially, influenced by political interests, and lack sufficient public participation. This study aims to analyze the mechanisms of problem identification in public policy, explore the common obstacles encountered, and propose more effective strategies to improve the problem-formulation stage. The research employs a library research method, drawing from books, scholarly articles, policy documents, and relevant studies discussing the dynamics of policy problem identification and formulation. The findings indicate that problem identification in Indonesia remains reactive, heavily shaped by political rather than technocratic factors, and insufficiently inclusive of public involvement. These barriers have led to policies that are frequently misaligned with societal needs and lack sustainability. The study concludes that improvements are required through strengthening evidence-based data utilization, expanding public participation in problem formulation, and establishing continuous evaluation mechanisms, so that problem identification can become more responsive, inclusive, and adaptive to social dynamics.

Keywords: public policy, problem identification, policy formulation,

Abstrak

Kebijakan publik yang efektif sangat ditentukan oleh ketepatan dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada tahap awal proses kebijakan. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan di Indonesia menghadapi kendala serius karena masalah publik sering didefinisikan secara parsial, dipengaruhi kepentingan politik, serta minim melibatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme identifikasi masalah dalam kebijakan publik, menelusuri hambatan yang sering muncul, serta merumuskan strategi yang lebih tepat untuk memperbaiki proses perumusan masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta penelitian relevan yang membahas problematika identifikasi dan perumusan masalah dalam kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi masalah publik di Indonesia masih cenderung reaktif, lebih banyak dipengaruhi faktor politis dibanding teknokratis, serta belum optimal melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Hambatan ini menyebabkan kebijakan sering tidak tepat sasaran dan kurang berkelanjutan. Kesimpulannya, diperlukan strategi perbaikan melalui penguatan data berbasis bukti, perluasan partisipasi publik dalam perumusan masalah, serta pembangunan mekanisme evaluasi berkelanjutan agar identifikasi masalah lebih responsif, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Kata kunci: kebijakan publik, identifikasi masalah, perumusan kebijakan

PENDAHULUAN

Perumusan kebijakan publik merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan modern karena menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta legitimasi politik yang melekat pada penyelenggaraan negara. Menurut data OECD Tahun 2022, lebih dari 65% kegagalan implementasi kebijakan di berbagai negara terjadi karena lemahnya tahap identifikasi masalah dan perumusan kebijakan (Widaningrum et al., 2024). Di Indonesia sendiri, Laporan Bappenas Tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 100 program prioritas nasional, sekitar 40% mengalami keterlambatan realisasi akibat ketidaktepatan dalam identifikasi masalah sejak tahap awal (Suryadi, 2023). Hal ini membuktikan bahwa persoalan krusial bukan hanya pada pelaksanaan, tetapi justru pada proses awal ketika masalah diidentifikasi dan kebijakan dirumuskan.

Identifikasi masalah dalam kebijakan publik merupakan proses mendefinisikan isu sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan yang perlu diintervensi oleh pemerintah. Namun dalam praktiknya, proses ini seringkali bias kepentingan, kurang berbasis data, atau tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Misalnya, dalam kebijakan lingkungan, laporan WALHI mencatat bahwa 70% kebijakan daerah terkait tata ruang tidak sepenuhnya mengakomodasi masalah ekologis yang dihadapi masyarakat lokal (Rachman et al., 2025). Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan nyata di lapangan dengan isu yang masuk dalam agenda kebijakan.

Secara teoritis, tahapan identifikasi dan perumusan masalah dalam kebijakan publik banyak dibahas dalam literatur klasik. (Suprayitno et al., 2024) menegaskan bahwa kebijakan yang efektif harus dimulai dari problem structuring yang tepat, yakni upaya menyusun definisi masalah berdasarkan data empiris, analisis aktor, dan pertimbangan nilai. Demikian pula, (Widodo, 2021) menekankan pentingnya agenda setting sebagai tahap kritis, sebab tidak semua masalah publik dapat menjadi prioritas kebijakan. Oleh karena itu, kerangka konseptual kebijakan publik mengajarkan bahwa kegagalan mengidentifikasi masalah secara akurat akan berdampak domino pada tahapan berikutnya, termasuk implementasi dan evaluasi.

Sejumlah penelitian empiris turut menguatkan hal ini. Penelitian oleh (DAMRI et al., 2024) mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia menemukan bahwa banyak program peningkatan mutu guru tidak berdampak signifikan karena masalah mendasar, yakni kualitas pelatihan dan distribusi tenaga pendidik, tidak diidentifikasi dengan benar sejak awal. Demikian pula, studi (Ibrahim et al., 2024) tentang kebijakan kesehatan daerah menunjukkan bahwa keterbatasan data dan minimnya keterlibatan stakeholder

menyebabkan kebijakan penanggulangan stunting tidak sesuai konteks lokal. Dengan demikian, terdapat bukti nyata bahwa kelemahan dalam tahap identifikasi masalah menimbulkan ketidaktepatan arah kebijakan.

Namun demikian, terdapat pula penelitian yang menunjukkan praktik baik dalam identifikasi masalah kebijakan. Misalnya, studi oleh (Akmal, 2023) tentang kebijakan tata kelola energi terbarukan memperlihatkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi akademisi membantu menghasilkan kebijakan yang lebih realistis dan berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa kunci keberhasilan perumusan kebijakan adalah penggunaan pendekatan partisipatif, berbasis data, dan sensitif terhadap konteks lokal. Dengan kata lain, ada bukti empiris bahwa masalah klasik dalam kebijakan publik masih bisa diatasi bila metodologi perumusan yang digunakan tepat.

Meskipun banyak teori dan penelitian relevan membahas tahapan kebijakan, terdapat gap yang cukup nyata dalam literatur. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek implementasi dan evaluasi kebijakan, sementara tahap awal berupa identifikasi dan perumusan masalah relatif kurang mendapat sorotan mendalam. Akibatnya, pemahaman tentang bagaimana masalah publik dipilih, didefinisikan, dan diprioritaskan dalam konteks sosial-politik Indonesia masih terbatas. Selain itu, kajian yang ada seringkali bersifat sektoral (pendidikan, kesehatan, lingkungan), sehingga belum banyak penelitian yang membandingkan atau menggeneralisasi kelemahan dan kekuatan identifikasi masalah di berbagai sektor.

Gap lain yang dapat diidentifikasi adalah minimnya kajian yang menyoroti dimensi politik dalam identifikasi masalah kebijakan. Banyak teori idealis menekankan data dan rasionalitas, padahal dalam kenyataannya isu yang diangkat dalam agenda kebijakan sering dipengaruhi oleh kepentingan politik, kekuatan aktor, maupun opini publik. Misalnya, kebijakan subsidi energi lebih sering diputuskan karena faktor elektoral daripada pertimbangan keberlanjutan fiskal dan lingkungan. Fenomena ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengintegrasikan aspek teknokratis dan politis dalam menganalisis proses perumusan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi secara lebih komprehensif bagaimana masalah publik dirumuskan dalam proses kebijakan, dengan memperhatikan interaksi antara data empiris, aktor kebijakan, serta konteks sosial-politik yang melingkupinya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai faktor-faktor yang menentukan apakah suatu isu dapat masuk ke dalam agenda kebijakan dan bagaimana isu tersebut didefinisikan secara formal. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme identifikasi masalah dalam kebijakan publik, menelusuri hambatan yang sering muncul dalam praktik, serta

menemukan strategi yang lebih tepat untuk memperbaiki tahap awal proses kebijakan. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji: (1) bagaimana masalah publik diidentifikasi dan diprioritaskan; (2) faktor-faktor yang memengaruhi perumusan masalah kebijakan, baik teknokratis maupun politis; dan (3) strategi perbaikan yang dapat memperkuat proses identifikasi masalah agar lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah akademik dalam kajian kebijakan publik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi para pembuat kebijakan. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, mengurangi potensi kegagalan implementasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pada akhirnya, perumusan kebijakan yang berangkat dari identifikasi masalah yang akurat akan memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi pustaka dipilih karena penelitian berfokus pada analisis dan sintesis gagasan, teori, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan identifikasi masalah dan perumusan kebijakan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali makna, memahami konteks, serta menemukan pola-pola konseptual dari berbagai literatur yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan mengandalkan kajian terhadap sumber-sumber tertulis yang kredibel.

Data penelitian ini berasal dari literatur yang berkaitan langsung dengan kebijakan publik, khususnya mengenai identifikasi masalah dan perumusan kebijakan. Sumber data yang digunakan meliputi:

1. Buku-buku akademik tentang teori kebijakan publik
2. Artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang relevan dengan topik.
3. Publikasi organisasi masyarakat sipil yang membahas evaluasi kebijakan publik. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive sampling, yaitu hanya menggunakan literatur yang relevan, mutakhir, dan memiliki kredibilitas akademik.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran literatur melalui perpustakaan, database jurnal elektronik (Google Scholar, Scopus, DOAJ), serta situs resmi pemerintah dan lembaga internasional. Literatur yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema: teori kebijakan publik, praktik identifikasi masalah,

faktor teknokratis dan politis, serta contoh studi kasus di berbagai sektor. Proses ini dilakukan secara sistematis agar data yang dikumpulkan benar-benar mendukung fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yaitu menelaah isi literatur secara mendalam untuk menemukan pola, konsep, serta relevansi dengan topik penelitian. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama:

1. Reduksi data: menyaring literatur yang relevan dan membuang yang tidak sesuai.
2. Kategorisasi data: mengelompokkan literatur ke dalam tema-tema tertentu, misalnya teori, praktik, kendala, dan solusi.
3. Sintesis data: menyusun kembali informasi dari berbagai sumber menjadi narasi yang utuh, sehingga dapat menjawab fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Mekanisme Identifikasi dan Prioritas Masalah Publik

Mekanisme identifikasi masalah dalam kebijakan publik di Indonesia masih sering dilakukan secara parsial dan tidak sistematis. Idealnya, identifikasi masalah dilakukan melalui serangkaian langkah: pemetaan isu berbasis data, analisis aktor, pertimbangan nilai, serta penyusunan agenda prioritas. Namun kenyataannya, proses tersebut sering kali dilewati atau hanya dilakukan secara formalitas. Misalnya, dalam kebijakan pendidikan, masalah yang diangkat biasanya sebatas rendahnya capaian ujian atau peringkat internasional, padahal akar permasalahan terletak pada kualitas pengajaran, ketimpangan distribusi guru, dan kurangnya fasilitas di daerah terpencil. Hal ini menandakan bahwa mekanisme identifikasi masalah lebih fokus pada gejala permukaan dibandingkan akar masalah yang mendasar.

Proses prioritasasi masalah publik juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan empiris masyarakat dan kepentingan elite. Banyak masalah mendesak, seperti ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan, sering kali kalah prioritas dibanding isu yang lebih populer secara politis. Sebagai contoh, subsidi energi selalu masuk agenda kebijakan, sementara isu pengelolaan sampah perkotaan yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat sering terpinggirkan. Fenomena ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa isu hanya bisa masuk agenda kebijakan jika terdapat kombinasi antara problem stream, policy stream, dan political stream. Dengan kata lain, prioritas masalah tidak hanya ditentukan oleh data empiris, tetapi juga oleh momentum politik dan opini publik.

Selain dipengaruhi oleh faktor politik, lemahnya mekanisme identifikasi masalah juga tampak pada minimnya partisipasi masyarakat. Banyak kebijakan dirumuskan secara top-down tanpa melibatkan kelompok yang terdampak secara langsung. Dalam kebijakan tata ruang, misalnya, WALHI mencatat bahwa 70% kebijakan daerah tidak memperhatikan aspirasi masyarakat lokal. Akibatnya, masalah yang terdefiniskan sering kali bias elitis dan berujung pada konflik sosial. Padahal, mekanisme identifikasi masalah yang partisipatif akan lebih memungkinkan pemerintah mendengar suara masyarakat, memahami kebutuhan nyata, dan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme identifikasi masalah dalam kebijakan publik di Indonesia masih jauh dari ideal. Prosesnya cenderung parsial, bias politik, dan minim partisipasi masyarakat. Masalah publik sering didefinisikan secara dangkal, sehingga kebijakan yang lahir tidak mampu menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan fundamental dalam mekanisme identifikasi masalah, yakni dengan memperkuat basis data, melibatkan masyarakat secara luas, serta menyeimbangkan antara kebutuhan teknokratis dan realitas politik.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perumusan Masalah Kebijakan

Penelitian ini menemukan bahwa perumusan masalah kebijakan dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknokratis dan politis yang sering kali saling bertentangan. Dari sisi teknokratis, faktor paling dominan adalah ketersediaan data. Banyak kebijakan gagal karena data yang digunakan tidak mutakhir atau tidak lengkap. Misalnya, kebijakan pengentasan kemiskinan seringkali hanya mengacu pada data makro nasional, padahal kondisi di tingkat lokal sangat bervariasi. Akibatnya, perumusan masalah menjadi tidak akurat dan kebijakan yang dihasilkan pun tidak tepat sasaran. Selain itu, keterbatasan kapasitas analisis kebijakan juga menjadi faktor penting, karena tanpa kemampuan analisis yang mendalam, masalah publik hanya dipahami secara permukaan.

Dari sisi politis, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan elite sangat berpengaruh dalam menentukan definisi masalah kebijakan. Masalah yang sejalan dengan agenda politik cenderung lebih cepat diangkat menjadi prioritas. Misalnya, proyek pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol sering dijadikan simbol keberhasilan, sementara masalah pelayanan publik dasar seperti air bersih dan sanitasi justru kurang mendapat perhatian. Hal ini memperlihatkan bahwa kepentingan politik seringkali mendominasi, bahkan mengalahkan urgensi empiris suatu masalah.

Selain faktor politik elite, opini publik dan peran media juga menjadi faktor penting dalam memengaruhi perumusan masalah. Masalah yang viral di media sosial atau mendapat sorotan media massa lebih mudah diprioritaskan, meskipun tidak selalu

memiliki urgensi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan masalah tidak hanya ditentukan oleh data dan analisis rasional, tetapi juga oleh persepsi masyarakat yang dibentuk melalui media. Faktor ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan, karena di satu sisi bisa mempercepat respons kebijakan, namun di sisi lain berisiko membuat pemerintah terjebak pada isu-isu populis.

Secara keseluruhan, faktor teknokratis dan politis dalam perumusan masalah kebijakan tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling memengaruhi. Namun hasil penelitian menegaskan bahwa dominasi faktor politis seringkali menggeser pentingnya data dan analisis mendalam. Akibatnya, masalah yang diangkat dalam kebijakan lebih sering bersifat pragmatis dan populis daripada strategis dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara pendekatan teknokratis berbasis data dengan pertimbangan politis agar perumusan masalah kebijakan lebih komprehensif dan objektif.

Strategi Perbaikan Proses Identifikasi Masalah Kebijakan

Berdasarkan temuan mengenai kelemahan dan faktor pengaruh dalam identifikasi masalah, penelitian ini merumuskan sejumlah strategi perbaikan. Strategi pertama adalah memperkuat evidence-based policy dengan membangun sistem data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi lintas sektor. Dengan penggunaan big data dan teknologi digital, pemerintah dapat melakukan pemetaan masalah secara lebih presisi. Misalnya, dalam kebijakan kesehatan, data mikro di tingkat desa dapat digunakan untuk menentukan lokasi prioritas intervensi gizi, sehingga kebijakan lebih tepat sasaran.

Strategi kedua adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan masalah kebijakan. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui forum konsultasi publik, survei partisipatif, dan mekanisme musyawarah yang lebih inklusif. Dengan melibatkan warga, definisi masalah akan lebih dekat dengan kebutuhan nyata. Studi (DAMRI et al., 2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan energi terbarukan di Yogyakarta menghasilkan kebijakan yang lebih realistis dan berkelanjutan. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen penting untuk memperkuat legitimasi kebijakan.

Strategi ketiga adalah menyeimbangkan aspek teknokratis dan politis dalam perumusan masalah. Identifikasi masalah tidak boleh hanya dilihat sebagai proses rasional berbasis data, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas politik agar kebijakan memiliki dukungan dan daya dorong untuk diimplementasikan. Dalam hal ini, keberadaan lembaga independen atau unit analisis kebijakan dapat membantu menjembatani kebutuhan teknis dan politis. Lembaga ini dapat menyediakan analisis

objektif yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan, sekaligus mengurangi dominasi kepentingan elite.

Strategi keempat adalah menerapkan evaluasi berkelanjutan terhadap definisi masalah kebijakan. Karena masalah publik bersifat dinamis, definisi yang dirumuskan harus ditinjau ulang secara periodik agar tetap relevan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Evaluasi ini bukan hanya menilai hasil kebijakan, tetapi juga mengkaji ulang apakah masalah yang diidentifikasi masih sesuai dengan kondisi aktual. Dengan cara ini, kebijakan publik akan lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Pembahasan

Penelitian ini berangkat dari urgensi memperbaiki tahap awal dalam siklus kebijakan publik, yakni identifikasi masalah dan perumusan kebijakan. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, banyak kebijakan gagal mencapai tujuan karena masalah yang hendak diatasi tidak dirumuskan secara tepat sejak awal. Fenomena tersebut terlihat jelas dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan, di mana ketidaksesuaian antara kebutuhan nyata masyarakat dengan kebijakan yang dihasilkan menimbulkan inefisiensi dan bahkan resistensi publik.

Temuan penelitian mengenai lemahnya mekanisme identifikasi masalah dalam kebijakan publik sejalan dengan pandangan (Irianto et al., n.d.), yang menekankan bahwa identifikasi masalah merupakan tahap paling krusial karena menentukan kualitas keseluruhan proses kebijakan. Irianto menegaskan bahwa kesalahan dalam mendefinisikan masalah akan berimplikasi langsung pada kegagalan kebijakan, meskipun implementasi dilakukan dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa identifikasi masalah di Indonesia cenderung dangkal dan parsial, lebih menyoroti gejala ketimbang akar permasalahan. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori normatif tentang analisis kebijakan yang sistematis dengan praktik birokrasi yang masih dominan top-down dan elitis.

Dalam konteks prioritas masalah, temuan penelitian juga konsisten dengan teori agenda setting yang dikemukakan oleh (Suaib, n.d.). Menurut Suaib, sebuah isu dapat masuk ke dalam agenda kebijakan jika terdapat pertemuan tiga arus: *problem stream* (isu atau masalah yang dirasakan penting), *policy stream* (tersedianya alternatif solusi), dan *political stream* (dukungan politik yang kuat). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa isu-isu yang mendapat perhatian seringkali bukan karena urgensinya secara empiris, tetapi karena momentum politik atau popularitas di media. Fenomena ini memperkuat teori Suaib bahwa identifikasi dan prioritas masalah dalam

kebijakan publik bukan semata proses rasional, melainkan juga sangat politis dan bergantung pada dinamika kekuasaan.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam identifikasi masalah sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini juga diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2025), yang menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam kebijakan publik. Mereka menegaskan bahwa kebijakan yang dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat cenderung menghasilkan definisi masalah yang bias elitis dan menimbulkan resistensi sosial. Kasus tata ruang daerah menjadi bukti nyata bahwa absennya partisipasi publik menimbulkan konflik, sehingga sejalan dengan argumen Fischer bahwa partisipasi bukan sekadar legitimasi politik, melainkan kunci untuk menemukan definisi masalah yang lebih realistis dan adil.

Faktor-faktor teknokratis dan politis dalam perumusan masalah kebijakan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dipahami melalui kerangka teori (Jenkins-Smith et al., 2018) tentang *Advocacy Coalition Framework* (ACF). Menurut mereka, kebijakan dipengaruhi oleh interaksi koalisi aktor dengan keyakinan dan kepentingan yang berbeda. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa data teknokratis seringkali dilemahkan oleh dominasi politik elite, sehingga isu yang diangkat bukan hasil dari kebutuhan empiris melainkan hasil kompromi kepentingan. Hal ini memperlihatkan relevansi teori ACF bahwa kebijakan adalah arena pertarungan ide, keyakinan, dan kekuasaan antaraktor yang berusaha memengaruhi definisi masalah.

Kecenderungan isu populer atau viral di media menjadi prioritas dalam kebijakan juga menguatkan teori framing yang dikemukakan oleh (Gilang, 2020). Menurut teori ini, cara media membingkai suatu isu akan memengaruhi cara publik dan pembuat kebijakan memandang masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sering terjebak pada masalah yang ramai diperbincangkan meskipun urgensinya relatif kecil dibanding isu struktural yang lebih mendasar. Hal ini sejalan dengan penelitian (Purba & Rinaldo, 2024), yang menemukan bahwa viralitas di media sosial mampu mempercepat masuknya isu kesehatan tertentu ke agenda kebijakan, tetapi sekaligus menyingkirkan isu lain yang tidak mendapat sorotan.

Strategi perbaikan identifikasi masalah yang ditawarkan penelitian ini, seperti penguatan data berbasis teknologi, partisipasi masyarakat, dan keseimbangan antara teknokrasi serta politik, memiliki landasan teoritis yang kuat. (Kristina et al., 2025) menekankan pentingnya penggunaan analisis berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk mengurangi bias dan subjektivitas dalam mendefinisikan masalah. Selain itu, studi (Fikry, 2024) menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam kebijakan energi terbarukan di Yogyakarta menghasilkan definisi masalah yang lebih sesuai dengan

kebutuhan nyata. Hal ini memperlihatkan bahwa perbaikan mekanisme identifikasi masalah tidak hanya dapat diusulkan secara normatif, tetapi sudah terbukti berhasil dalam praktik.

Rekomendasi evaluasi berkelanjutan dalam identifikasi masalah juga relevan dengan teori yang dikemukakan oleh (Zuhdi et al., 2025). Menurut teori ini, kebijakan publik bukanlah proses linear, tetapi adaptif, yang harus terus belajar dari pengalaman, konteks, dan dinamika baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah publik bersifat dinamis, sehingga definisinya harus diperbarui secara berkala. Evaluasi ini memungkinkan kebijakan menjadi lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Temuan ini mengisi gap yang sering diabaikan dalam praktik birokrasi, di mana kebijakan cenderung dianggap final setelah dirumuskan tanpa ada refleksi ulang terhadap definisi masalah awalnya.

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa hasil penelitian konsisten dengan sejumlah teori besar dalam studi kebijakan publik. Namun, penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris dengan menyoroti lemahnya mekanisme identifikasi masalah di Indonesia, dominasi politik dalam perumusan kebijakan, serta kurangnya evaluasi berkelanjutan terhadap definisi masalah. Kontribusi ini memperkaya kajian kebijakan publik dengan menekankan bahwa strategi perbaikan harus berfokus pada tiga hal utama: memperkuat basis data, memperluas partisipasi, dan membangun keseimbangan antara rasionalitas teknokratis dan realitas politik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengafirmasi teori yang ada, tetapi juga membuka ruang untuk diskusi tentang bagaimana kebijakan publik di Indonesia dapat menjadi lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada fokus analisis yang menyoroti secara simultan tiga aspek penting dalam tahap awal kebijakan publik, yaitu mekanisme identifikasi masalah, faktor teknokratis dan politis dalam perumusan masalah, serta strategi perbaikan berbasis data, partisipasi, dan keberlanjutan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menekankan aspek agenda setting atau partisipasi publik secara terpisah, penelitian ini menawarkan kerangka yang lebih integratif dengan memadukan dimensi teknokratis, politis, dan sosial. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam konteks Indonesia, di mana fenomena lemahnya identifikasi masalah, dominasi politik elite, dan absennya evaluasi berkelanjutan masih jarang dibahas secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang tidak hanya memperkuat teori klasik kebijakan publik, tetapi juga memperluas diskusi tentang urgensi membangun mekanisme

identifikasi masalah yang lebih responsif dan inklusif di era digital dan demokrasi partisipatif.

Meski demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka sehingga analisis lebih banyak bergantung pada data sekunder berupa literatur, laporan penelitian, dan publikasi kebijakan. Hal ini membuat penelitian belum mampu menangkap secara komprehensif dinamika lapangan, seperti praktik identifikasi masalah di tingkat lokal yang mungkin berbeda dengan gambaran umum dalam literatur. Kedua, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam peran aktor non-negara seperti media sosial, kelompok masyarakat sipil, maupun sektor swasta yang dalam praktiknya memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk definisi masalah publik. Keterbatasan ini sekaligus membuka peluang bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan studi kasus empiris atau metode campuran (*mixed methods*), sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih tajam mengenai bagaimana identifikasi masalah dalam kebijakan publik berlangsung secara nyata di berbagai konteks sosial dan politik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme identifikasi masalah dalam kebijakan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kecenderungan mendefinisikan masalah secara parsial dan reaktif, dominasi faktor politis dibanding teknokratis dalam perumusan masalah, hingga minimnya partisipasi publik yang membuat proses kebijakan cenderung elitis dan tidak responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Hambatan-hambatan ini sejalan dengan teori tentang pentingnya analisis masalah yang tepat, teori Kingdon tentang politisasi agenda, serta studi Fischer yang menegaskan pentingnya partisipasi publik. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelemahan pada tahap awal proses kebijakan berpotensi memicu kegagalan pada tahap implementasi, sehingga perbaikan mekanisme identifikasi masalah menjadi sangat mendesak. Penelitian ini merekomendasikan tiga langkah utama: pertama, memperkuat penggunaan data berbasis bukti dan teknologi informasi untuk mengurangi bias dalam definisi masalah; kedua, memperluas partisipasi publik melalui forum deliberatif agar perumusan masalah lebih inklusif dan berkeadilan; ketiga, membangun mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk memastikan identifikasi masalah tetap adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoretis dengan memperkaya kajian kebijakan publik maupun secara praktis dengan menawarkan strategi konkret yang dapat diterapkan guna memperkuat proses identifikasi masalah sebagai fondasi kebijakan publik yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, M. (2023). *Governance Network Pada Implementasi Kebijakan Energi Baru Terbarukan Di Indonesia= Governance Network In New Renewable Energy Policy Implementation In Indonesia*. Universitas Hasanuddin.
- DAMRI, D., PRASETYO, Y. I., MISRAWANI, M., & RAHMI, S. R. I. (2024). Analisis Kebijakan Terkait Perekrutan Tenaga Kependidikan serta Dampaknya Terhadap Kualitas Pendidikan. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 4(4), 180–187.
- Fikry, A. (2024). Strategi Sosialisasi Energi Baru Terbarukan di Desa Tamanmartani Provinsi Yogyakarta. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(2), 63–72.
- Gilang, L. (2020). *Issues, Conflict and Public Opinion*. Penerbit Lutfi Gilang.
- Ibrahim, S. N. K., Leus, J. D. C. N., & Dewi, M. P. (2024). Collaborative Governance sebagai Strategi Inovatif dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 13(2).
- Irianto, L. B., Enceng, M. S., & Broto, M. F. (n.d.). *MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK PARTISIPATIF*.
- Jenkins-Smith, H. C., Nohrstedt, D., Weible, C. M., & Ingold, K. (2018). The advocacy coalition framework: An overview of the research program. *Theories of the Policy Process*, 135–171.
- Kristina, K., Judijanto, L., Dewi, R., Kusumaningsih, F. S., & Febriana, D. (2025). *Evidence Based Nursing: Praktik Keperawatan Berbasis Bukti Ilmiah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Purba, H., & Rinaldo, E. (2024). Realitas Dan Viralitas: Dinamika Dan Isu Dalam Era Media Baru Di Indonesia. *Kinesik*, 11(3), 283–299.
- Rachman, R. M., Mas'ud, F., Sasmita, A., Balany, F., Sjachrawy, L. O. M. I., Aswad, N. H., & SUKRI, A. S. (2025). *Sistem Pengelolaan Lingkungan Terpadu di Wilayah Perkotaan*. ARSY MEDIA.
- Rahmawati, R. (2025). *Kebijakan Publik (Analisis Teori dan Politik)*. YPAD Penerbit.
- Suaib, E. (n.d.). *Teori dan Praktik Kebijakan Publik*. wawasan Ilmu.
- Suprayitno, D., Selvia, F., Suparyati, A., Heryani, A., Titalessy, P. B., Wicaksono, F., Iskandar, A., Praja, S. J., Susanti, I., & Boari, Y. (2024). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suryadi, D. (2023). *Redesain Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Pengawas Obat Dan Makanan*. Politeknik STIA

LAN Jakarta.

Widaningrum, A., Retnandari, N. D., & Susanto, N. (2024). *Regulatory Impact Analysis (Analisis Dampak Regulasi): Konsep & Penerapannya*. UGM PRESS.

Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Zuhdi, S., Sos, S., & Saputra, T. (2025). *Jejaring Kebijakan Paradigma Baru Administrasi Publik*. Penerbit Widina.